

KETERKAITAN KEARIFAN BUDAYA DAN PRAKTIK EKONOMI: STUDI SEJARAH KEARIFAN BUDAYA ETNIS TIONGHOA TUBAN DI TENGAH PP NOMOR 10 TAHUN 1959

Sholihah Pratiwi Amin Rahayu

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
E-mail: Sholihahrahayu@mhs.unesa.ac.id

Artono

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
E-mail: artono@unesa.ac.id

Abstrak

Etnis Tionghoa jamak ditemui di seluruh kota di Indonesia, tidak terkecuali di Tuban. Letaknya yang berada di pesisir utara pantai Jawa bahkan menjadi pijakan awal kedatangan mereka. Kedatangan etnis Tionghoa dari tanah asalnya membawa misi ekonomi, yakni perdagangan. Banyak daerah yang terbantu perekonomiannya dengan datangnya etnis Tionghoa di Nusantara. Seiring berjalannya waktu banyak dari masyarakat lokal yang tidak mampu bersaing dengan para etnis Tionghoa termasuk di Kabupaten Tuban. Sehingga pemerintah pada saat itu mengeluarkan PP Nomor 10 Tahun 1959 tentang Larangan bagi Pedagang Kecil dan Eceran yang Bersifat Asing. Meskipun demikian Peraturan Presiden tersebut tidak berhasil, karena masyarakat lokal tidak mampu merefleksikan cara kerja etnis Tionghoa. Oleh karena itu pembahasan tersebut menarik perhatian peneliti. Sehingga didapatkan permasalahan tentang apa saja faktor-faktor cultural yang mendasari keberhasilan manajemen kekayaan etnis Tionghoa yang perlu direfleksikan demi kemajuan ekonomi Tuban? Kemudian peneliti juga berusaha mencari tahu dampak PP Nomor 10 Tahun 1959 terhadap etnis Tionghoa di Tuban pada masa itu. Dari permasalahan yang didapatkan tersebut maka akan diteliti menggunakan metode penelitian sejarah dan terbagi menjadi empat tahapan yaitu heuristik (Pengumpulan Sumber), kritik (verifikasi), interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan sejarah). Hasil yang didapat selama melakukan penelitian menunjukkan bahwa etnis Tionghoa yang telah sejak lama tinggal di Tuban memiliki kultur yang ulet serta etos kerja yang tinggi. Faktor kultural demikian adalah pendorong bagi keberhasilan dominasi ekonomi dari dulu hingga sekarang. Kemudian dampak adanya PP Nomor 10 Tahun 1959 menyebabkan tersendatnya perekonomian masyarakat. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengganti peranan yang dijalankan oleh etnis Tionghoa selama ini untuk menjadidistributor barang kebutuhan.

Kata Kunci: Etnis Tionghoa, Ekonomi, PP No.10 Tahun 1959.

Abstract

There are many ethnic Chinese in all cities in Indonesia, there is no education in Tuban. Its location on the northern coast of the coast of Java even became the starting point for their arrival. The arrival of ethnic Chinese from their homeland brought an economic mission, namely trade. Many regions have helped their economy with the arrival of ethnic Chinese in the archipelago. Over time, many of the local people were unable to compete with the ethnic Chinese, including those in Tuban Regency. So that the government at that time issued PP Number 10 of 1959 concerning the Prohibition of Foreign Small and Retail Traders. However, the Presidential Regulation was not successful, because the local community was unable to assess the workings of the ethnic Chinese. Therefore, the discussion attracted the attention of researchers. So that we get a problem about what are the cultural factors owned by the wealth management of the ethnic Chinese that need to be reflected for the economic progress of Tuban? Then the researchers also tried to find out the impact of PP No. 10 of 1959 on the Chinese ethnicity in Tuban at that time. From the problems obtained, it will be investigated using historical research methods and is divided into four stages, namely heuristics (Source Collection), criticism (verification), interpretation (interpretation), and historiography (historical writing). The results obtained during the research show that ethnic Chinese who have lived in Tuban for a long time have a tenacious culture and high work ethic. Culture is the driving force for the success of economic domination from the past until now. Then the impact of PP No. 10 of 1959 caused the community's economy to stagnate. This is because there is no substitute for the role played by ethnic Chinese so far to become a distributor of necessities.

Keywords: Ethic Chinese, Economy, PP No.10 Tahun 1959.

PENDAHULUAN

Etnis Tionghoa asli maupun Tionghoa peranakan di Indonesia hingga kini masih identik dengan perdagangan bisnis. Di tengah masyarakat lokal, etnis Tionghoa biasa Nampak dengan took kelontong rumahan hingga took besar dengan pekerja-pekerjanya. Fenomena tersebut memang tidak secara menyeluruh, dan mayoritas diisi oleh generasi X. Perkembangan zaman turut mendorong munculnya sektor-sektor profesi lain seperti; ilmuwan, ahli hukum, arsitek hingga pemain film. Namun, fenomena ekonomi diawal tetap menunjukkan trend yang identik. Sama halnya Indonesia sebagai bangsa yang agraris dan maritim. Praktik-praktik ekonomi yang telah melekat masih Nampak dominan hingga sekarang.

Mengenai Tuban sebagai lingkup spasial, pada dasarnya telah beberapa penelitian oleh beberapa peneliti. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Santi Puspitaviani dari Universitas Airlangga Surabaya, berjudul "Aktivitas Ekonomi Etnis Tionghoa di Tuban 1945-1959". Penelitian tersebut menjelaskan mengenai bagaimana intensi etnis Tionghoa dalam perdagangan dan kegiatan perekonomian lain sepanjang awal kemerdekaan hingga muncul PP No.10 Tahun 1959. Berikutnya juga terdapat penelitian oleh Amir Faisal yang berjudul "Dinmika Sosial Ekonomi Etnis Tionghoa dengan Jawa di Kecamatan Welahan dari Masa Orde Baru sampai dengan Reformasi", penelitian tersebut berfokus pada bagaimana kebijakan pemerintah berdampak terhadap situasi social dan ekonomi antara etnis Tionghoa dan etnis Jawa selama Orde Baru.

Tuban dihuni oleh beragam etnis, baik pribumi maupun Asing. Tuban sebagai jalur utama lintas provinsi di utara Jawa, juga menjadi salah satu lokasi awal kedatangan etnis Tionghoa sejak dinasti Tang di abad ke-7. Jauh sebelum kedatangan orang-orang Eropa, Dalam sejarah bangsa Indonesia tercatat ada sekelompok orang Tiongho ayang datang ke Jawa, tepatnya di kota Tuban.¹

Para imigran Tionghoa lambat laun terbiasa dengan bahasa dan adat istiadat di mana mereka berada. Hal ini tercermin dalam berbagai aspek kesenian Jawa, khususnya pola dan ragam yang dapat di jumpai pada baik tulis. Sebagian dari mereka yang bahkan melakukan perkawinan silang, kemudian menjadi ahli seni dan pelindung kesenian Jawa.²

Pada perkembangan selanjutnya, mereka memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Orang-orang Tionghoa selain melakukan perdagangan disekitar pantai, juga melakukan profesi seperti; memotong rambut, servis sepeda, menjahit, penghasil kayu, Las besi dan juru koki.

Peran etnis Tionghoa untuk perekonomian masyarakat cukup menonjol dibandingkan dengan kelompok etnis lainnya. Sampai saat ini orang Tionghoa dianggap sebagai suatu kelompok ekonomi yang kuat, terutama menonjol dibagian komoditi bidang perdagangan serta industri. Adapun kelompok dalam komunitas Tionghoa yang lebih besar kecil yang menunjukkan kekuatan ekonomi yang luarbiasa.

Tidak hanya di Tuban etnis Tionghoa memiliki peran sangat besar dalam sebuah pembangunan kota di masa lampau berkat cara kerja, disiplin dan pola

pikirnya membuat mereka menjadi kelompok yang tangguh dibanding yang lainnya sehingga membuat perbedaan yang sangat mencolok antara masyarakat lokal dengan etnis Tionghoa.³

Pertemuan dua masyarakat yang berbeda, antara Indonesia dan etnis Tionghoa tersebut menyebabkan pengaruh atau percampuran kebudayaan dari beberapa bidang. Namun tidak semua akulturasi kebudayaan berpengaruh kepada masyarakat lokal. Terutama pada prinsip-prinsip ekonomi yang tidak berhasil diturunkan kepada masyarakat lokal di Kabupaten Tuban.

Masyarakat local telah berusaha didorong pertumbuhan kelas pengusahanya sejak awal kemerdekaan, tetapi pada kenyataannya masih belum mampu menyaingi, bahkan menyamai etnis Tionghoa di negeri sendiri. Perkembangan model ekonomi capital yang memanfaatkan modal menjadi model yang mendunia dan masuk berkat globalisasi. Berbagai upaya ini belum membuahkan hasil yang memuaskan. Kebiasaan ekonomi masyarakat yang berkuat pada sector agrarian dan maritime memerlukan adaptasi yang lebih panjang dibanding etnis Tionghoa.

Latar belakang adanya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1959, tidak lepas dari kebijakan pemerintah dalam menentukan struktur ekonomi Indonesia setelah pengakuan kedaulatan. Menteri Perdagangan (Dr. Saroso Djojoh dikusumo) dan industry (Dr. Saroso Wirodjo) melakukan perencanaan awal dengan merumuskan satu program ekonomi yang diberi nama Rencana Urgensi Perekonomian (RUP). Rencana tersebut bertujuan guna memberikan bimbingan dalam kegiatan sector industry dan sector pertanian yang tujuannya ialah memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk mengawasi pembentukan perusahaan-perusahaan baru. Rencana tersebut adalah suatu langkah bercorak nasionalistis guna mengurangi adanya ketergantungan Indonesia atas kepentingan ekonomi yang dilakukan oleh orang asing.

Penjelasan Bourdieau mengenai pentingnya ranah, modal social sebagai basis generative dianggap sesuai sebagai alat analisis. Kesemuanya adalah elemen penting dalam menjaga rhytme praktik social suatu kelompok dalam kondisi yang berubah-ubah. Basis generatif ini menjadi pijak dalam identifikasi keterkaitan habitus dengan praktik-praktik sosial, terutama ekonomi. Latar belakang yang dipaparkan, muncul beberapa rumusan masalah tentang apa faktor-faktor cultural yang mendasari baiknya manajemen kekayaan etnis Tionghoa yang perlu direfleksikan demi kemajuan ekonomi Tuban? Kemudian peneliti juga berusaha mencari tahu dampak PP Nomor 10 Tahun 1959 terhadap etnis Tionghoa di Tuban 1959.

Dari paparan di atas penulis memutuskan untuk mengambil judul "Keterkaitan Kearifan Budaya dan Praktik Ekonomi: Studi Sejarah Kearifan Budaya Etnis Tionghoa Tuban di Tengah PP Nomor 10 Tahun 1959" sebagai penelitian skripsi. Penulis juga beranggapan bahwa masih belum ada yang menulis penelitian sejarah terkait Kearifan Budaya dan Praktik Ekonomi di Tuban. Kajian ini tidak hanya akan mengungkap sejarah tentang etnis Tionghoa pada tahun 1959. Namun juga akan

¹ Leo Suryadinata. 2002. *Negaradan Etnis Tionghoa Kasus Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES, hlm.120.

² ----. (2014). *LASEM: Sejarah Panjang Toleransi*". Lasem: Komunitas Rumah Buku Lasem, hlm23

³Wawancara dengan Suroso, tanggal 14 Januari 2020 di Kecamatan Merakurak, Tuban.

mengupas tentang faktor-faktor mengapa masyarakat Tuban tidak mampu terpengaruh prinsip-prinsip ekonomi dari etnis Tionghoa dan peneliti mencoba mengupas tentang nilai-nilai kultural yang dapat dicontoh untuk sebuah kemajuan ekonomi di wilayah Tuban.

METODE

Pada penelitian sejarah selalu dibutuhkan sebuah informasi dari berbagai sumber untuk merangkai secara kronologis sebuah kejadian yang terjadi dimasa lalu. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode penelitian sejarah. Metode sejarah adalah bagaimana cara mengetahui sejarah sehingga seorang sejarawan mampu mengetahui prosedur dalam penelitian sejarah agar ia mampu menjelaskan sebuah peristiwa sejarah.⁴ Penelitian yang dilakukan ini melalui empat tahap yaitu, heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (pengklasifikasian sumber), interpretasi (sintesis dan analisis) dan historiografi (penulisan sejarah).

Tahap pertama yang dilakukan peneliti yaitu heuristik. Dalam tahapan ini dilakukan proses pencarian dan penemuan sumber-sumber yang akan diperlukan. Penelitian ini menggunakan model studi arsip, sehingga sumber-sumber yang dipakai sepanjang penelitian, keseluruhannya merupakan literatur. Sumber-sumber primer yang dipakai seputar kedatangan awal etnis Tionghoa, ajaran Konghucu, serta beberapa keterangan mengenai perekonomian Etnis Tionghoa di Tuban. Keterangan tersebut diperoleh dari Surat Kabar Obor Rakyat dan Pelita Rakyat, diakses secara online dari situs Perpustakaan pada Maret-Juni 2021. Sumber-sumber lebih banyak didapatkan dalam bentuk sumber sekunder, yakni berupa buku dan artikel yang diakses secara online.

Tahap kedua adalah kritik yakni memverifikasi sumber yang didapat. Dalam penelitian ini menggunakan kritik intern dan ekstern. Kritik intern dilakukan untuk mengetahui kebenaran isi dari suatu sumber yang berhasil diperoleh dengan membandingkan sumber, sedangkan kritik ekstern melalui cara menguji subjek dan objek penelitian yakni dengan melihat biografi informan, tempat yang menjadi lokasi-lokasi pabrik yang berdiri pada tahun 1959 dan beberapa daerah yang masih berkaitan dengan penelitian ini.

Tahapan yang ketiga yaitu tahap interpretasi atau penafsiran yang dilakukan setelah tahap kritik sumber. Untuk tahapan ini seorang sejarawan diberikan sebuah tuntutan mencari hubungan berbagai macam fakta yang telah ditemukan selanjutnya dilakukan penafsiran. Fakta-fakta yang diperoleh kemudian dikaitkan secara berurutan agar membentuk suatu peristiwa sejarah. Rangkaian dari fakta tersebut belum merupakan suatu historiografi, akan tetapi sebuah kerangka dari bangunan sejarah. Agar supaya rangkaian tersebut menjadi sebuah kisah sejarah, maka diperlukanlah interpretasi. Interpretasi yang dilakukan didukung dengan penggunaan landasan teoretis, yakni perspektif teori praktik social menurut Pierre Bourdieu.

Tahapan ketiga adalah interpretasi, melalui penggabungan fakta-fakta yang diperoleh selama wawancara dan sumber data lainnya kemudian saling dihubungkan agar menjadi petunjuk yang lebih jelas.

Tahapan terakhir adalah historiografi atau tahapan penulisan sejarah. Penulisan ini merupakan klimaks dari suatu kegiatan penelitian sejarah. Dalam tahap ini, rangkaian fakta yang telah ditafsirkan kemudian dituangkan secara tertulis sebagai sebuah kisah sejarah. Penulisan dilakukan sesuai dengan pedoman penulisan yang dipergunakan oleh lembaga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Etnis Tionghoa di Tuban

Tradisi spiritualitas berkaitan erat dengan corak-corak yang dibawa ke tanah baru, dalam hal ini Tuban. Corak tersebut merupakan habitus yang sudah lama terbentuk sebagai hasil internalisasi struktur social yang dibatinkan.⁵ Habitus merupakan produk sejarah yang terbentuk setelah manusia lahir dan berinteraksi dengan masyarakat dalam ruang dan waktu tertentu. Habitus bukan bawaan alamiah atau kodrat tetapi merupakan hasil pembelajaran lewat pengasuhan dan bersosialisasi dalam masyarakat. Proses pembelajarannya sangat halus, tidak disadari dan tampil sebagai hal yang wajar. Individu bukanlah agen yang sepenuhnya bebas, dan juga bukan produk pasif dari struktur sosial.⁶

Agama Khonghucu pada awalnya berkembang di daratan Cina saat Dinasti Han (abad II SM – II M) termasuk agama yang komunal, di mana keikutsertaan dalam peribadatan di keluarga, di kota dan didalam negara merupakan bagian dari kewajiban warga negara, dan merupakan tanda pengakuan atas otoritas paternal maupun kerajaan.⁷ Umat Konghucu lebih banyak terkonsentrasi di kecamatan Tuban kota. Terdapat Kelenteng sebagai pusat peribadahan hingga sekarang.

Berdasarkan pada ajaran Confucius, dijelaskan bahwa realitas yang sebenarnya terjadi pada kehidupan yang terjadi di dunia bagaimana tentang mencari cara hidup harmonis, adil, dengan begitu akan timbul kehidupan ideal pada masyarakat. Tidak hanya itu saja, di dalam najaran ini juga menekankan pada bagaimana cara menghormati satusama lain, kepada orang yang lebih tua seperti, nenek moyang kita, orangtua, dan juga kakak.⁸ Pada harapannya dalam ajaran ini, diharapkan masyarakat memiliki hubungan yang harmonis yang bisa dimulai dilakukan pada keluarga dengan cara saling menghormati, dari hal tersebut timbul sikap saling menghormati, damai dan entran, serta dengan begitu nilai bakti dan penghormatan kepada orang yang lebih tua juga semakin dapat meningkatkan rasa toleransi.

Berdasarkan nilai-nilai Confucius ini muncul etos kerja orang Tionghoa yang berdasar pada disiplin, bakti pada keluarga, toleransi besar pada rutinitas, dan pragmatisme yang kuat. Adanya situasi yang dijelaskan seperti sebelumnya, dapat kita lihat bagaimana alur aktivitas ekonomi wiraswasta yang dibangun oleh etnis Tionghoa, hal tersebut dapat dilihat bagaimana cara mereka mendapat rasa kepercayaan yang tinggi, serta kreativitas dan inovatif. Tidak hanya itu saja mereka juga pandai dalam menjalin kekuatan hubungan dalam jaringan ekonomi yang telah mereka bentuk, sifat

⁴ S Gazalba. 1981. *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*. Jakarta: Bharata Karya Aksara, hlm.3.

⁵ Fauzi Fashri. 2014. *Pierre Bourdieu: Menyingkap Kuasa Simbol*. Yogyakarta: Jalasutra.

⁶ Fauzi Fashri. *Ibid*.

⁷ Joko Tri Haryanto. *Op. Cit*, hlm 201-202

⁸ Fung Yu Lan. (1980). *Sejarah Pendek Filsafat Tiongkok* Yogyakarta: Taman Siswa, hlm 3

mereka yang hemat juga memengaruhi etos kerja, etos wirausahawan wiraswasta mereka bangun.⁹

Etos kerja yang dijalankan oleh masyarakat tionghoaini memiliki nilai unik, sebab mereka memiliki kepercayaan bahwa dengan membuat rasa bahagia, harmonis yang terjalin pada kehidupan sehari-hari akan menimbulkan rasa bahagia pada orang tua dan leluhur mereka, dengan begitu mereka percaya bahwa membuat hubungan harmonis akan mendapatkan kehidupan sejahtera. Tidak hanya itu saja mereka juga menjalankan kehidupan dengan disiplin sesuai dengan ajaran Confucius, etos kerja mereka cukup disiplin, hemat, tekun dan cukup teliti, hal tersebutlah yang membuat masyarakat Tionghoa berhasil dalam menjalankan perdagangan.

Berdasarkan data Etnis Tionghoa perantau merupakan masyarakat yang memiliki ekonomi berstrata bawah. Tidak hanya itu mereka bekerja keras di negara baru atau Negara perantau disebabkan mereka merupakan orang mereka memiliki pemikiran agar memiliki kehidupan lebih maju dari sebelumnya dengan begitu mereka dapat menyambung kehidupan selanjutnya, tidak hanya itu saja mereka juga berusaha kuat di tengah menjalani kehidupan yang harus berdampingan dengan pribumi yang jelas memiliki budaya yang berbeda dari mereka. Orang Tionghoa ini cukup memiliki nilai sosial dan budaya yang telah melekat pada kepribadian mereka dalam menjalankan bisnisnya. Bisnis-bisnis yang mereka jalankan tidak lepas dari nilai unik yang mereka percaya yaitu system kerjasecara kekeluargaan. Dengan begitu bias dibalang etnis pribumi memiliki teknik yang kurang baik dari etnis Tionghoa ini, sebab etnis Tionghoa lebih mengutamakan pengeluaran mereka untuk menjalankan bisnis mereka dibandingkan dengan kebutuhan personal semata.

B. Faktor Kultural Keberhasilan Manajemen Kekayaan Dagang Etnis Tionghoa Tuban

Secara historis, aktivitas ekonomi perdagangan orang-orang Tionghoa merupakan keberlanjutan yang cukup lama. Perdagangan awal mereka yang berlangsung di pelabuhan Tuban, merupakan sumber pendapatan tahunan yang sangat penting bagi penguasa pribumi. Orang-orang Tionghoa telah berhasil menguasai perdagangan ekspor-impor, pedagang eceran hingga pedagang perantara.

Setelah terakumulasinya kekayaan, modal tersebut diinvestasikan untuk menyewa tanah, mendirikan pabrik-pabrik gula, tahu, petis, terasi, kecap, pengilingan padi, dan rokok sehingga bidang usaha mereka semakin luas.¹⁰

Kota Tuban menjadi "kota antara" yang strategis, apalagi dengan adanya pelabuhan Kambang Putih. Kawasan di bagian timur kota banyak dibangun rute jalan untuk aktivitas ekonomi. Hal itu kemudian memudahkan masyarakat membentuk jaringan perdagangan. Pada abad ke-15 Tuban menjelma sebagai pelabuhan utama di wilayah Pantai Utara Jawa Timur.

Kondisi ini dimanfaatkan dalam melakukan aktivitas perdagangan. Orang-orang Tionghoa membangun jaringan kerja perdagangan tiga arah, yakni pertama, jaringan kerja perdagangan antar sesama etnis Tionghoa, kedua, menjalin hubungan dengan elite pribumi, ketiga, membangun jaringan kerja perdagangan antara pedagang-pedagang Tionghoa dengan pengusaha kolonial, baik VOC, Inggris, maupun Hindia-Belanda.¹¹ Yang tertindas pada segi politis. Dapat dijelaskan sebab masyarakat Tionghoa ini bekerja keras di perantauan karena mereka memiliki pemikiran agar memiliki kehidupan lebih maju dari sebelumnya dengan begitu mereka dapat menyambung kehidupan selanjutnya, tidak hanya itu sajamerka juga berusaha kuat ditengah menjalani kehidupan yang harus berdampingan dengan pribumi yang jelas memiliki budaya yang berbeda dari mereka. Orang Tionghoa ini cukup memiliki nilai sosial dan budaya yang telah melekat pada kepribadian mereka dalam menjalankan bisnisnya. Bisnis-bisnis yang mereka jalankan tidak lepas dari nilai unik yang mereka percaya yaitu system kerja secara kekeluargaan. Dengan begitu bias dibalang etnis pribumi memiliki teknik yang kurang baik dari etnis Tionghoa ini, sebab etnis Tionghoa lebih mengutamakan pengeluaran mereka untuk menjalankan bisnis mereka dibandingkan dengan kebutuhan personal semata.

Dengan demikian, jaringan kerjasama perdagangan ini saling memberi keuntungan. Meskipun terjadi perubahan konstalasi politik, hal tersebut tidak berpengaruh banyak dan mereka tidak tersingkir.¹² Bahkan seorang Tionghoa, Chien Ho, ditunjuk oleh pemerintah colonial Belanda sebagai perwakilan kerjasama tersebut di Tuban. Chien Ho merupakan pengusaha palawija yang sukses abad ke-16 sampai dengan 17. Selain sukses, Chien Ho juga cakap dan menguasai bahasa Belanda.

Pada perjalanannya, memang tidak keseluruhan menempuh jalan sebagai pedagang. Di wilayah pedalaman (wilayah Bangilan, Jatirogo, dan Montong) orang-orang Tionghoa bekerja di pertukangan kayu, maupun sebagai petani.¹³

Perkembangan aktivitas perdagangan dan ekonomi etnis Tionghoa di Tuban yang signifikan terjadi antarentang tahun 1945 hingga 1950-an. Hal ini dikarenakan sikap etos kerja dan pola perdagangan kekeluargaan serta kekerabatan yang dibangun oleh masyarakat etnis Tionghoa di Tuban secara turun-temurun. Sehingga secara tidak langsung juga membawa pengaruh bagi perkembangan ekonomi di Tuban pasca kemerdekaan. Etnis Tionghoa juga membuka usaha merajang tembakau, tembakau merupakan salah satu hasil perkebunan yang ada di wilayah Tuban yang terletak di Jl. Kuti (sekarang menjadi jalan Jl. Merakurak) dan Jl. Minongo. Dahulu perusahaan ini dimiliki oleh pemerintah Kolonial Belanda. Nama dari perusahaan tembakau ini adalah

⁹ Raymond Dawson. (1992). *Penata Budaya Kerajaan Langit*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm 132

¹⁰ Retno Winarni dan Sartono Kartodirjo, *Aktivitas Ekonomi Perdagangan Orang-Orang Cina Di Pantai Utara Jawa Timur Pada Abad XVII*, dalam *Jurnal Sosio Humanika*, 12 September 1999 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hlm. 327-328

¹¹ Hani T Handoko. (1996). *Tradisi (Managen) Dagang Ala Tionghoa, Dalam Penguasa Ekonomi dan Siasat Penguasa*

Tionghoa. Yogyakarta: Kanisius, hlm 71.

¹² F.A. Sutjipto. (1993). *Kota-Kota Pantai di Sekitar Selat Madura Abad XVII Sampai Medio Abad XIX*, Disertasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hlm 149.

¹³ Liem Twan Djie. (1995). *Pedagang Perantara Distribusi Orang-Orang Cina di Jawa: Suatu Studi Ekonomi*, terj Jakarta: Gramedia, hlm 65.

Hakken Tabak yang kemudian berkembang menjadi Sigaretten Fabriekanten.¹⁴

Tembakau-tembakau tersebut diambil daunnya dan dirajang dengan menggunakan pisau khusus yang disebut Gedok. Daun yang sudah dikeringkan kemudian disetorkan ke pabrik rokok untuk dijadikan bahan baku rokok kretek atau rokok lintingan. Selain sebagai pengusaha merajang tembakau, etnis Tionghoa di Tuban juga ada yang berdagang tembakau secara eceran. Pedagang tembakau eceran di dalam menjual tembakaunya dilakukan dengan cara diglindir (biasanya tembakau seperti ini dibeli dan dipakai sebagai susur untuk ngingang oleh kaum perempuan). Tembakau seperti ini dikonsumsi dengan cara dilinting dengan memakai klobot jagung yang dicampur dengan cengkeh untuk dijadikan rokok linting.

Perkembangan selanjutnya dari pabrik gula Jati Waringin memang berperan serta dalam perkembangan industri di wilayah kota Tuban. Hal tersebut dikarenakan pabrik gula ini dalam mendapatkan bahan bakunya (tebu) berasal dari hasil perkebunan masyarakat sekitar Tuban. Disamping itu etnis Tionghoa yang mengelola pabrik gula tersebut banyak mengambil tenaga kerja dari penduduk setempat. Selain itu, di Tuban juga ada pabrik gula lainnya milik Yap Boen Tiong yang sekarang berubah fungsinya menjadi Toserba Samudra yang terletak (dahulu terletak di Jl. Watu Tiban) sekarang menjadi Jl. Diponegoro, kelurahan Ronggomulyo.¹⁵ Pabrik Gula milik Yap Boen Tiong berdiri pasca kemerdekaan, akan tetapi pabrik gula yang di produksi adalah gula Jawa atau gula aren yang terletak di Jl. Mondoan Timur.

Setelah bergerak dalam usaha pelayanan jasa dengan pendirian tempat penginapan seperti hotel Ping An, pabrik gula, merajang tembakau, pabrik rokok, pabrik kecap, dan penyelepan padi. Etnis Tionghoa di Tuban juga melebarkan sayap usaha dagangnya dalam bidang makanan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat Tuban. Usaha makanan yang dijalankan oleh mereka adalah pembuatan mie. Mi atau juga sering ditulis mie adalah adonan tipis dan panjang yang telah digulung, dikeringkan dan dimasak dengan air mendidih. Istilah ini juga merujuk pada mie kering yang harus dimasak kembali dengan dicelupkan kedalam air. Orang Tionghoa telah mengklaim bahwa mereka sebagai pencipta makanan tersebut.

C. Dampak PP Nomor 10 tahun 1959 bagi etnis Tionghoa di Tuban

Secara historis, pengakuan kedaulatan Indonesia pertama oleh Belanda dan dunia internasional, pemerintah Indonesia menyadari bahwa adanya struktur ketidakuntungan atau bias dibidang rugi dalam perekonomian terutama pada pembangunan nasional. Dapat dijelaskan, kelas menengah merupakan golongan Tionghoa sedangkan pada kelas atas merupakan pedagang.¹⁶

Perkembangan mengakibatkan beberapa perubahan terutama pada saat adanya PP No. 10 Tahun 1959

dimana peraturan ini ditanda tangani oleh Menteri perdagangan Rachmat Mujomiseroola oleh warga Negara asing, selain pertanian langsung dari petani kemudian diperdagangkan ke kota lain. Selain itu, ada juga yang bekerja sebagai renternir yakni meminjamkan sejumlah uang dengan bunga yang besar kepada masyarakat kecil. Pada masa tersebut etnis Tionghoa di Tuban tergolong kelas menengah yang berkucupan taraf ekonominya disbanding pribumi Tuban sendiri.

Itu usaha tersebut harus diserahkan kepada warga Pribumi. Tidak hanya itu saja, adanya peraturan tersebut mengakibatkan pembatasan yang berketerlibatan dengan etnis tionghoa terutama pada sektor ekonomi, hal tersebut berhubungan juga pada gerakan Assat. Gerakan Assat ini muncul pada cabinet Ali Sastroamijoyo II. Dengan adanya gerakan ini bertujuan untuk menuntut hak pengusahaan asli untuk diberikan fasilitas serta perlakuan yang berbeda.¹⁶ Pada tahun 1959 Pemerintah Indonesia banyak mengumumkan beberapa sejumlah tindakan pelarangan bagi orang asing untuk berdagang dipedesaan, hal tersebut terjadi juga pada daerah Tuban. Peristiwa tersebut merupakan salah satu aksi sentiment Tionghoa yang kemudian hari terus berkembang dan mengakibatkan pergolakan terhadap etnis Tionghoa.

Isi dari Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1959 menegaskan kembali larangan yang berlaku pada masakabinet sebelumnya. PP No. 10 bab I dijelaskan pedagang eceran ataupun pedagang kecil yang bersifat asing ialah perusahaan yang dikenakan larangan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Tanggal 14 Mei 1959 No. 2933/M. Peraturan itu sendiri memiliki isi yakni member batasan tentang perdagangan eceran sebagai perusahaan "...mencari keuntungan dari pembelian dan penjualan barang tanpa mengadakan perubahan teknis pada barang itu... (perusahaan yang melakukan penyebaran, yakni menjadi penghubung terakhir untuk menyampaikan barang-barang langsung kekonsumen dan melakukan perdagangan pengumpulan, yakni membeli barang-barang dari produsen-produsen kecil untuk diteruskan ke alat-alat perantara selanjutnya..."¹⁷

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1959 bagian bab II pasal 2 membahas bagaimana aturan sistem likuidasi perdagangan diterapkan, dampak dari aturan likuidasi ini adalah pedagang eceran atau pedagang kecil. Pedagang yang dimaksud merupakan pedagang-pedagang asing, likuidasi ini menyebabkan pedagang asing harus segera menutup usaha mereka sebelum tanggal 1 Januari 1960, dengan syarat:

- 1) Peraturan pemerintah ini merupakan langkah dari beberapa likuidasi yang diterapkan pada pemerintah.
- 2) Ketentuan tersebut bukan berarti orang-orang asing yang bersangkutan harus meninggalkan tempat tinggalnya, kecuali penguasa daerah yang terkait dengan kondisi keamanan yang menetapkannya.
- 3) Untuk Perusahaan yang dimaksud pada pasal 2 akan

¹⁴ Liem Twan Djie. (1995). *Ibid*, hlm 12.

¹⁵ Soeparmo, R. (1983). *Hari Jadi Tuban dan 700 Tahun Kota Tuban*. Tuban: Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban, hlm 5-6. Etnis Tionghoa sebagai pedagang tengkulak adalah dengan mengumpulkan hasil pertanian langsung dari petani kemudian diperdagangkan ke kota lain. Selain itu, ada juga yang bekerja sebagai renternir yakni meminjamkan sejumlah uang dengan bunga yang

besar kepada masyarakat kecil. Pada masa tersebut etnis Tionghoa di Tuban tergolong kelas menengah yang berkucupan taraf ekonominya disbanding pribumi Tuban sendiri.

¹⁶ Leo Suryadinata, *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa* (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1999), hlm. 23.

¹⁷ Benny G. Setiono. *Op.cit.* hlm 99.

diganti kerugiannya sejumlah yang ditetapkan.¹⁸

Pemerintah berjanji memberikan ganti rugi setiap pedagang seperti yang disebutkan dalam pasal 2 berwujud maupun pinjaman. Ganti rugi dalam bentuk uang akan disesuaikan dengan modal yang dimiliki, tetapi modal tersebut akan diberikan pada penerus usaha yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Sedangkan dan rugi berupa pinjaman akan diberikan pemerintah dengan jangka waktu angsuran selama satu tahun dengan bunga 9% sesuai dengan aturan yang telah diberikan oleh koperasi.

Pada PP No. 10 Tahun 1959 menjelaskan bahwa warga Negara asing masih dapat menjalani kehidupan mereka sesuai dimana mereka memiliki tempat tinggal. Namun hal itu tidak berjalan begitu saja, sebab semua dikembalikan pada komando militer di wilayah setempat. Sebab komando militer juga memiliki hak untuk menjaga keamanan wilayah tersebut. Terdapat juga ketentuan yang dapat dilakukan pribumi pada saat itu yaitu membentuk koperasi dipedesaan, sehingga usaha-usaha etnis Tionghoa yang terkena dampak dari PP 10/1959 dapat ditampung dikoperasi pedesaan setempat, dan jika etnis tionghoa mau juga dapat bekerja pada koperasi yang telah dibangun oleh pedesaan yang mereka tempati. Secara garis besar pengalihan yang dilakukan ini juga dilakukan secara kemanusiaan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

PP No. 10 Tahun 1959 berpengaruh pula pada posisipedagang Tionghoa yang berstatus WNA di Kabupaten Tuban. Kondisi ini telah membuat posisi usaha mereka semakin terjepit. Pada saat itu terdapat sebuah kebijakan didalam PP 10/1959, di mana jika terdapat etnis tionghoa yang memiliki usaha menetap dan mereka tidak merubah status kewarganegaraan Indonesia, secara paksa usaha mereka akan ditutup, dengan begitu akan memiliki dampak perubahan pada aktivitas ekonomi di kota Tuban. Menutup tempat usaha tersebut, dengan adanya PP 10/1959 akan berpengaruh aktivitas ekonomi di kabupaten Tuban.¹⁹

Distribusi menurut mata pencaharian menunjukkan bahwa kaum pribumi terutama berkecimpung dalam bidang produksi bahan mentah terutama pertanian, perikanan, nelayan, buruh, serta bergerak dibidang eceran (dalam kategori ini termasuk bahan makanan, tekstil, kayu, bambu), dan lebih sedikit yang bergerak dibidang industri, sedangkan orang Tionghoa bergerak di bidang perdagangan, produksi bahan mentah dan industri lebih banyak.²⁰

Penerapan PP.No.10/1959 tersebut mengakibatkan munculnya masalah ekonomi yang cukup serius, yakni tersendatnya perekonomian masyarakat. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengganti peranan yang dijalankan oleh etnis Tionghoa selama ini untuk menjadi distributor barang kebutuhan.²¹ Keberadaan etnis Tionghoa sebagai distributor ternyata sangat dibutuhkan oleh aktivitas perekonomian masyarakat. Ketidakberadaan para pedagang Tionghoa, menyebabkan masyarakat sulit menjual barang dagangannya. Hingga akhirnya peraturantersebut dibekukan oleh pemerintah

setelah Menteri Luar Negeri Dr.Subandrio memberikan keterangan bahwa PP - 10 tidak mungkin dilaksanakan mengingat posisi RRT pada waktu itu sebagai salah satu negara komunis yangcukup menentukan dalam dunia internasional. Sejak saat itu PP-10 mulai dihentikan penerapannya.

PENUTUP

Etnis Tionghoa jauh sebelum kemerdekaan telah dating di nusantara, khususnya Tuban, telah memulai suatu kegiatan dagang dalam rangka memperbaiki kualitas hidup dibandingkan dengan tanahair mereka. Di nusantara, etnis Tionghoa memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia, memilih wilayah yang dekat dengan laut (pesisir) dan mulai menjalankan aktivitas perdagangannya. Aktivitas tersebut dapat dikatakan berhasil, secara latar belakang ajaran dan nilai tradisi, orang Tionghoa membekali diri dengan keuletan dan keberanian dalam menjalankan usaha sehingga lambat laun mereka dapat mencapai suatu kesuksesan.

Keberhasilan ekonomi etnis Tionghoa menjadi motivasi serius dalam penelitian ini, dimana factor kultural memainkan peranan yang sangat penting dalamupaya mengentaskan kemiskinan. Etnis Tionghoa yangtelah sejak lama tinggal di Tuban memiliki kultur yangulet serta etos kerja yang tinggi. Faktor kultural demikianadalah pendorong bagi keberhasilan dominasi ekonomi diera sekarang.

Dengan modal social dan kebiasaan (kultur) yang tertanam kuat demikian, maka permasalahan yang berkaitan dengan ranahnya pasti dapat tertangani dengan baik. Pendekatan kultural sebagai bentuk kearifan yang dimiliki oleh tiap-tiap masyarakat merupakan hal mendasar yang sayangnya seringkali terlewat. Standart perubahan yang dilakukan, atau standart kebijakan yang diterapkan belum menyentuh ranah yang disesuaikan dengan keahlian dan modal social masyarakat.

Keuletan dan etos kerja etnis Tionghoa yang didasarioleh ajaran Konghucu berpadu dalam kearifan lokal etnis tersebut, sehingga ranah yang dijalani, yakni bisnis perdagangan atau perantara dan semisalnya dapat dilakukan dengan baik. Bukan berarti tanpa ranah yang sama, masyarakat Indonesia tidak perlu merefleksikan habitus dan keahlian tersebut. Pada dasarnya hal tersebut ialah hal penting untuk mengentaskan kemiskinan, dimulai dengan mengatasi kemiskinan secara kultural itu sendiri.

Bahkan, di tengah situasi terbitnya PP No. 10 Tahun 1959 yang secara substansial membatasi usaha perdagangan eceran oleh warga Negara asing, mereka kemudian kembali mendapatkan tempatnya karena ranah yang mereka miliki tidak berhasil dijalankan dengan baik oleh pihak lain.

Adanya PP Nomor Tahun 1959 membuat perekonomian di Tuban berhenti dan tersendat sejenak. Banyak WNA etnis Tionghoa yang tidak diperkenankan untuk bekerja. Beberapa pekerjaan seperti toko dialihkan kepada masyarakat lokal. Hanya

¹⁸ Koran Obor Rakyat Juni 1959

¹⁹Inti dari PP. No.10 Tahun 1959 adalah larangan bagi usaha perdagangan kecil dan eceranyangbersifatasingdi luar Ibu Kota daerah Swatantra tingkat I dan II serta karesidenan, *Lembaran Negara Republik Indonesia* No.128 Tahun 1959. Peraturan ini muncul karena buntut dari kegagalan pelaksanaan peraturan-peraturan sebelumnya misalnya kebijakan Benteng. Kebijakan Benteng merupakan

kebijakan yang berusaha memberikan proteksi yang lebih pada usaha dari warga pribumi. Dalam penerapannya kebijakan ini mengalami kegagalan dan usaha kongsi dagang Tionghoa semakin tumbuh besar
²⁰Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa di Indonesia* (PT Gramedia: Jakarta, 1988), hlm. 76

²¹Wawancara dengan Yanto, tanggal 13 Desember 2019 di Kecamatan Merakurak, Tuban

saja tidak berhasil, perbedaan teknik kerja antara masyarakat lokal dan etnis Tionghoa membuat bisnis tersebut tidak dapat berjalan.

Selain itu, hal terpenting dalam mengatur arah kebijakan adalah dengan memahami karakteristik masyarakat dengan cermat. Kebijakan yang hanya berdasarkan *trend* tanpa melihat secara keseluruhan situasi yang berlangsung dapat berakibat buruk dalam keberlangsungan subjek sasarannya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Arsip/ Dokumen

Badan Pusat Statistika (BPS) Kab.Tuban.Tuban dalam Angka (dalam angka 1959).

Badan Pusat Statistika (BPS) Kab.Tuban. Tuban dalam Angka (dalam angka 1960).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1959.

B. Jurnal

Handinoto.(2015). "Lingkungan Pecinan dalam Tata Ruang Kota di Jawa pada Masa Kolonial" dalam Jurnal DIMENSI Universitas Khatolik Petra Vol. 27, No. 1

Hartono, Samuel dan Hadinoto. (2005). "Alun-alun dan Revitalisasi Identitas KotaTuban" dalam Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur Vol.33 No. 1 Desember 2005.

Surabaya: Univeristas Kristen Petra

Haryanto, Joko Tri. (2009). "Struktur dan Stratifikasi Umat Konghucu di Kabupaten Tuban Jawa Timur", dalam Jurnal Analisa Vol. XVI, No. 2

Santi Puspitaviani dan ShintaDevi Ika Santhi Rahayu.2015. Aktivitas Ekonomi Etnis Tionghoa di Tuban Tahun 1945-1959. VERLEDEN: Jurnal Kesenjarahan, Vol.3, No.2:144-153.

Winarni, Retno dan Sartono Kartodirjo. (1999). "Aktivitas Ekonomi Perdagangan Orang-Orang Cina Di Pantai Utara Jawa Timur Pada Abad XVII", dalam Jurnal Sosiohumanika, 12 September 1999 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

C. Buku

Creel, H.G. (1990). Alam Pikiran Cina (Terj. Soejono Soemargono). Yogyakarta: Tiara Wacana

Dawson, Raymond.(1992). Penata Budaya Kerajaan Langit. Jakarta: Pustaka UtamaGrafiti

De Graaf, H.J. (1998). Cina Muslim di Jawa Abad XV dan XV Iantara Historitas dan Mitos Yogyakarta:TiaraWacana

Edkins, Jenny & Nick Vaughan Williams. 2013. Teori-teori Kristis: Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fashri, Fauzi. (2014). PierreBoudieu: Menyingkap Kuasa Simbol. Yogyakarta: Jalasutra.

Gazalba, S. 1981. Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu. Jakarta: Bharata Karya Aksara

Lan, Fung Yu. (1980). Sejarah Pendek Filsafat Tiongkok Yogyakarta: Taman Siswa

Lubis, Akhyar Yusuf. 2014. Postmodernisme: Teori dan Metode. Jakarta: Rajawali Pers

M, Hidajat Z. (1977). Masyarakat dan Kebudayaan Cina Indonesia Bandung: Tarsito

Ricklefs, M.C. (2005). Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: Serambi

Ritzer, George & Douglas J. Goodman. 2012. Teori Sosiologi Modern. (Alimandan, Pentj.). Jakarta: Kencana Prenada Group.

Sedyawati, Edi. (---). Tuban: Kota Pelabuhan di Jalan

Sutra Jakarta: Depdikbud

Setiono, Benny G. 2008. Tionghoa dalam Pusaran Politik. Jakarta: Transmedia

Suryadinata, Leo. 2002. Negara dan Etnis Tionghoa Kasus Indonesia. Jakarta: Pustaka LP3ES

Tan, Melly G. 1979. Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia. Jakarta: Gramedia

Widyahartono, Bob. (1998). Kongsi & Spekulasi Jaringan Kerja Bisnis Cina. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti

---. (2014). LASEM: Sejarah Panjang Toleransi". Lasem: Komunitas Rumah Buku Lasem

D. Wawancara

Wawancara dengan Suroso, selaku warga Kecamatan Merakurak, Tuban.

Wawancara dengan Yanto, selaku Warga Kecamatan Merakurak, Tuban.

E. Internet

Catatan Pertama Kedatangan Orang Tionghoa di Nusantara <https://historia.id/kuno/articles/catatan-pertama-kedatangan-orang-tionghoa-ke-nusantara-v5Eg3>, diakses pada tanggal 24 Januari 2020 pukul 13.41 WIB.

Menelusuri Sejarah Awal Masuknya Masyarakat Tionghoa di Nusantara

<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/18/12220121/menelusuri-sejarah-awal-masuknya-masyarakat-tionghoa-di-indonesia?page=all>, diakses pada tanggal 24 Januari 2020 pukul 14.05 WIB.